

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PEKERJAAN
DILUAR WILAYAH JABATAN**



Diajukan oleh :

**SITI RASKHA GHINA FARRAZ DHIYA
NIM. 2220216320020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PEKERJAAN
DILUAR WILAYAH JABATAN**

Penelitian Tesis untuk Tesis S-2

Program Magister Kenotariatan

Diajukan oleh :

**SITI RASKHA GHINA FARRAZ DHIYA
NIM. 2220216320020**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

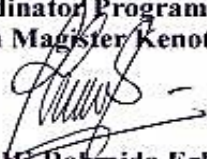
Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya

NIM : 2220216320020

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas :

Program Pascasarjana

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkura

Judul Tesis : **“Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan Diluar Wilayah Jabatan”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya

NIM. 2220216320020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 502/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya

Dengan Judul Tesis :

Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan diluar Wilayah Jabatan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Bandarmasin, 12 Agustus 2024

Direktur,



[Signature]

Prof. Dr. H. Dakang Biyatmoko, M.Si.
NIP 196805071993031020



Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya. 2024 “Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan Diluar Wilayah Jabatan” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., 103 Halaman.

RINGKASAN

Kode Etik Notaris yang dipergunakan sebagai pedoman para anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan Kode Etik Notaris dapat dimulai dengan suatu bentuk persaingan tidak sehat sesama rekan Notaris dapat dimulai dari upaya pencegahan (*preventif*). Notaris dapat memulai dari dirinya sendiri, dengan meningkatkan kualitas dirinya untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dan wewenangnya. Notaris berupaya demikian agar mampu bersaing dengan sehat di dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya. Notaris yang mampu meningkatkan kemampuannya dengan baik maka akandapat bersaing dengan sehat, sehingga dengan demikian akan mampu menciptakan hubungan yang harmonis sesama rekan sejawat. Adapun persaingan tidak sehat ini sendiri terkadang berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan: 1. Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum 2. Pengesahan suatu perjanjian 3. Penetapan suatu Kesepakatan Sehingga permasalahan yang peneliti uraikan diatas tersebut tentu telah lazim terjadi, namun apakah permasalahan persaingan tidak sehat seorang notaris ini yang mana menjalankan suatu pekerjaan yang diluar wilayahnya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa kode etik oleh dewan kehormatan notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait kewenangan Notaris melakukan pekerjaan diluar wilayah termasuk unsur persaingan usaha tidak sehat Notaris. dan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat Notaris.

Hasil penelitian diperoleh bahwa adapun persaingan tidak sehat ini sendiri berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan yaitu Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum, Pengesahan suatu perjanjian, Penetapan suatu Kesepakatan. Sehingga korelasinya dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17 yang mana sebenarnya untuk membuktikan

seorang notaris yang telah melakukan persaingan usaha tidak sehat maka unsurnya harus berkaitan dengan: Notaris tersebut membuat notaris lain menjadi sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap jasa yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi, dan Notaris tersebut mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam hal marketing pemasaran bidang jasa. Seperti halnya contoh skema yang terjadi sekarang ini, yang mana pihak ke tiga yang melakukan pengiklanan dengan iming-iming pembuatan PT,CV, suatu kelompok dan lain lainnya dengan margin harga yang murah, yang mana seharusnya hal tersebut padahal telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan Terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

**NOTARY'S AUTHORITY TO PERFORM WORK OUTSIDE
THE REGIONAL OFFICE AREA**

By

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya¹, Saprudin²
Master of Notary Study Program, Postgraduate Program,
Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary's Authority, Performt Work, Outside the Regional Office Area

The purposes of this research are to study and analyze the Notary's authority to perform work outside the region, including elements of the unfair business competition among the Notaries, and to study and analyze the authority of the Notary Supervisory Board regarding the violations of unfair business competition among the Notaries. The research method used is normative legal research. The research results are that the unhealthy competition itself is related to the Notaries who carry out their position outside their regional office area, such as legalizing deeds of establishment of business entities and legal entities, legalizing agreements, stipulations of agreement. Thus, the correlation with unhealthy business competition according to the provision of Article 17 of Act Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and related to the authority of the Notary Supervisory Council to conduct supervision, inspection and to impose sanctions on the Notaries, and that at every level the Notary Supervisory Council consisting of the Regional Supervisory Council (MPD), Provincial Supervisory Council (MPW); and the Central Supervisory Council (MPP), so for violations of unfair business competition, the efforts to enforce the Notary's code of ethics, namely based on Article 85 of Act Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries by placing a verbal warning in the first order of giving sanctions, is a warning to the notary from the Supervisory Council, and if he does not fulfil it, shall be followed up with written sanction. If this sanction is not complied with by the Notary concerned, subsequent sanction can be imposed in stages.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 2220216320020

² Supervisor

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya. 2024 “Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan Diluar Wilayah Jabatan” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., 103 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Melakukan Pekerjaan, Diluar Wilayah Jabatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait kewenangan Notaris melakukan pekerjaan diluar wilayah termasuk unsur persaingan usaha tidak sehat Notaris. dan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat Notaris. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum, adapun hasil penelitian diperoleh diketahui bahwa persaingan tidak sehat ini sendiri berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan yaitu Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum, Pengesahan suatu perjanjian, Penetapan suatu Kesepakatan. Sehingga korelasinya dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17, dan terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya. 2024 "Notary's Authority to Perform Work Outside the Area of Office" Master of Notary Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: Notary's Authority, Carrying Out Work, Outside the Office Area.

The purpose of this research is to examine and analyze the authority of Notaries to carry out work outside the region, including elements of unfair business competition for Notaries. and to review and analyze the authority of the Notary Supervisory Board regarding violations of

unfair business competition for Notaries. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials, while the research results are obtained. It is known that this unhealthy competition itself is related to Notaries who carry out positions outside their area of office, such as ratifying deeds of establishment of business entities and legal entities, ratifying an agreement, stipulating an agreement. So the correlation is with unhealthy business competition according to the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely Article 17, and related to the authority of the Notary Supervisory Council which carries out supervision, inspection and imposes sanctions on Notaries, and at every level. The Notary Supervisory Council consists of the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Council (MPW); and the Central Supervisory Council (MPP), so that for violations of unfair business competition, efforts to enforce the Notary's code of ethics, namely based on Article 85 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries by placing a verbal warning in the first order of giving sanctions, is a warning to notary from the Supervisory Council which if not fulfilled is followed up with written sanctions. If this sanction is not complied with by the notary concerned, subsequent sanctions can be imposed in stages.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan hikmat yang telah diberikannya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan Diluar Wilayah Jabatan”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Magister Kenotariatan pada Studi Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu dengan rasa terima kasih, penulis selalu mengharapkan petunjuk maupun saran yang bersifat positif dan membangun dalam rangka perbaikan dan yang lebih penting saran-saran konstruktif tersebut tentu saja akan lebih menambah wawasan bagi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan partisipasi khususnya kepada:

1. Bapak P r o f . Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuaan arahan serta masukan wawasan pengetahuan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada Dosen Penguji yang berkesempatan untuk menilai dan menguji kompetensi kemampuan penulis, kesemuanya tentu saja akan memberikan nilai . tambah terhadap wawasan keilmuan penulis serta masukan-masukan perbaikan-perbaikan dari tesis penulis ini.
5. Semua rekan-rekan satu angkatan dalam studi Magister Kenotariatan ini, terima kasih atas rajutan persahabatan yang telah kita jalin selama ini dan dukungan kalian semua.
6. Kepada orang yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu Orang Tua tercinta (alm) PAPA dan juga BUNDA yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, tidak pernah henti untuk selalu memberikan

yang terbaik untuk anak-anaknya.

Tidak ada kata yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang membantu, kecuali hanya doa yang tulus dari hati nurani yang paling dalam semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan limpahan Rahmat dan Kasih SayangNya, memberkahi dan selalu melindungi mereka semua.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raskha', with a horizontal line underneath.

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya

NIM. 2220216320020

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	38
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan	40

BAB II KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR WILAYAH TERMASUK UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NOTARIS

A. Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Pekerjaannya Menurut Undang Undang Jabatan Notaris	41
B. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	64
C. Perbuatan Notaris Melakukan Pekerjaan diluar daerah Termasuk Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	72

BAB III KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NOTARIS

A. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menindak Pelanggaran yang dilakukan Notaris.....	86
B. Aspek Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menindak Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA